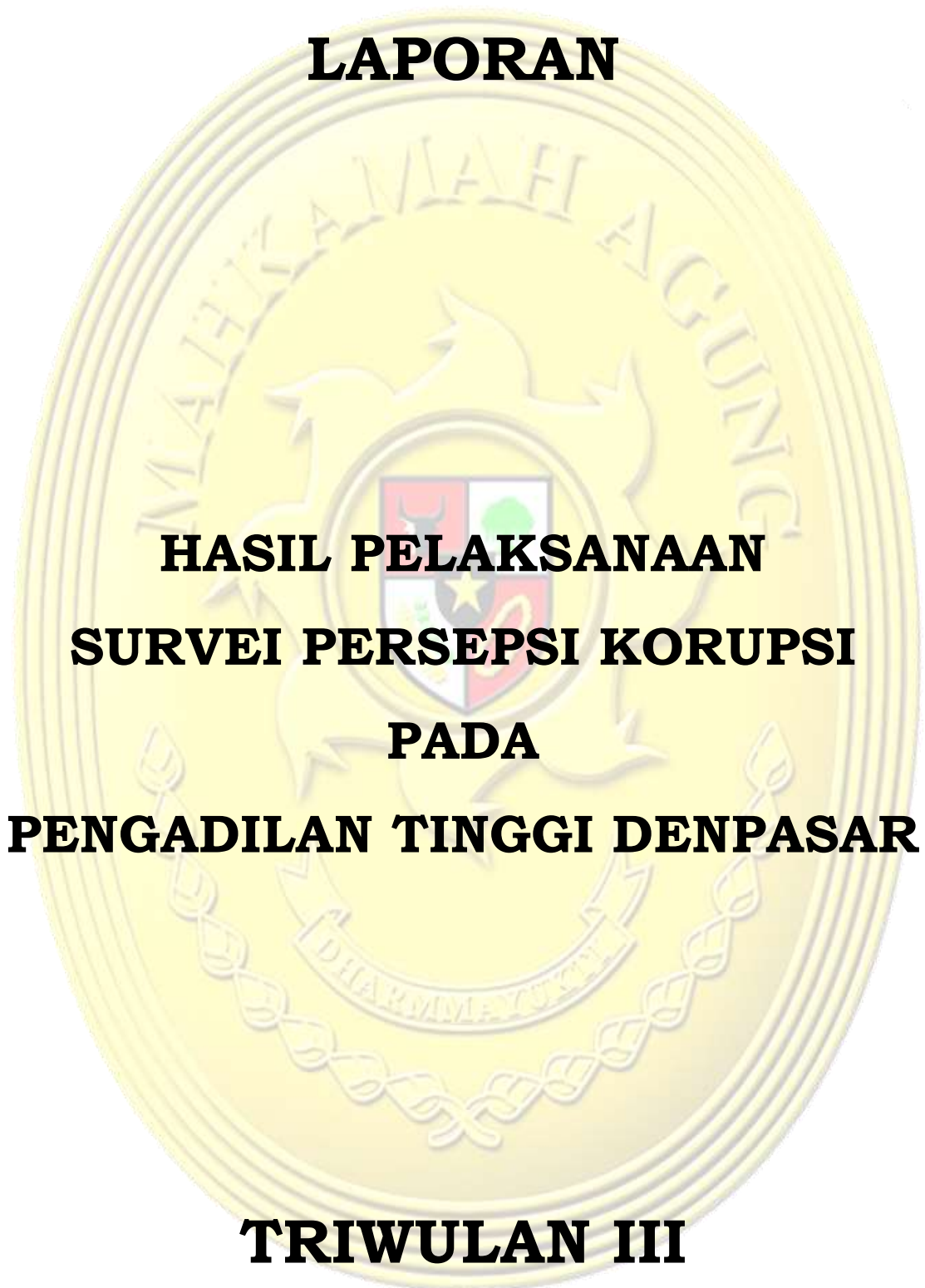


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

TRIWULAN III

TAHUN 2023



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI KORUPSI

PADA

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

TRIWULAN III

TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

Berdasarkan
**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah**

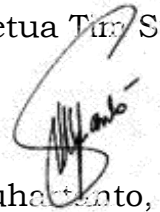
Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Oktober 2023

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar



Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.

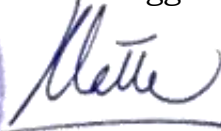
Ketua Tim Survei



Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,



H.MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

EXECUTIVE SUMMARY
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
Triwulan III Tahun 2023

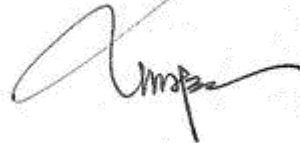
Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi Denpasar memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98 dengan hasil konversi 99,41 % atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,95
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,96
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,98
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,99
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,99
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 3,98

Denpasar, 3 Oktober 2023

Panmud Hukum/Sekretaris Tim Survei



I Wayan Pageh, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

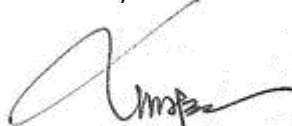
Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Denpasar mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Denpasar, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporannya ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Denpasar.

Denpasar, 3 Oktober 2023

Panmud Hukum/Sekretaris Tim Survei



I Wayan Pageh, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
EXSECUTIVE SUMMARY.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	22
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV PENUTUP.....	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi.....	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas...	7
Tabel. 2 Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi	8
Tabel. 3 Nilai Persepsi	8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden.....	9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden	10
Tabel 6. Domisili Responden	11
Tabel 7. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	12
Tabel 9. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	13
Tabel 11. Indeks pada indikator menjual pengaruh	15
Tabel 12. Indeks pada indikator Transaksi biaya	16
Tabel 13. Indeks pada indikator tambahan biaya.....	17
Tabel 14. Indeks pada indikator hadiah	18
Tabel 15. Indeks pada indikator transparansi pembayaran.....	19
Tabel 16. Indeks pada indikator percaloan.....	20
Tabel 17. Indeks pada indikator perbuatan curang.....	21
Tabel 18. indeks pada indikator transaksi rahasia.....	22
Tabel 19. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi denpasar.....	23
Tabel 20. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi denpasar.....	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden	10
Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden	11
Grafik 3. Domisili Responden	12
Grafik 4. Manipulasi Peraturan	13
Grafik 5. Penyalahgunaan Jabatan	14
Grafik 6. Menjual Pengaruh	15
Grafik 7. Transaksi Biaya	16
Grafik 8. Tambahan Biaya	17
Grafik 9. Hadiah	18
Grafik 10. Transparansi Pembayaran	19
Grafik 13. Percaloan	20
Grafik 14. Perbuatan Curang	21
Grafik 15. Transaksi Rahasia	22
Grafik 16. Indeks Persepsi Korupsi	23
Grafik 17. Indeks Persepsi Korupsi	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur yg telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan atau empat kali dalam satu tahun dan survei harian.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu di Wilayah Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dengan 105 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Denpasar). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, meminta responden mengisi kuesioner ke dalam mesin survei elektronik, meneliti data, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama , menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua* , mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel. 2 Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel. 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

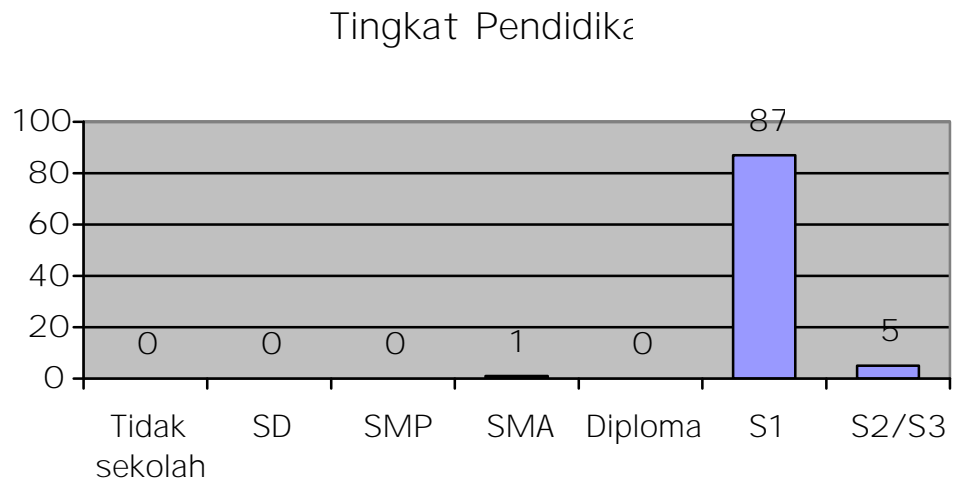
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat Sarjana S1 (93,56%).

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden

No.	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Tidak sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP/SLTP	0	0%
4	SMA/SLTA	1	1,07%
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	0	0%
6	Sarjana (S1)	87	93,56%
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	5	5,37%
Jumlah		93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

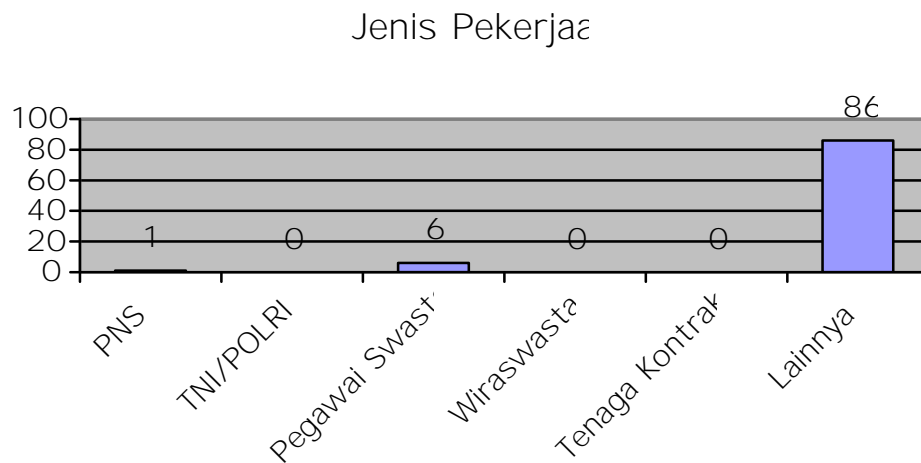
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 92,47 % responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan lainnya.

Tabel 5. Jenis pekerjaan responden

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		jumlah	%
1	PNS	1	1,07
2	TNI/POLRI	0	0,00
3	Pegawai Swasta	6	6,45
4	Wiraswasta	0	0,00
5	Tenaga kontrak	0	0,00
6	Lainnya	86	92,47
Jumlah		93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

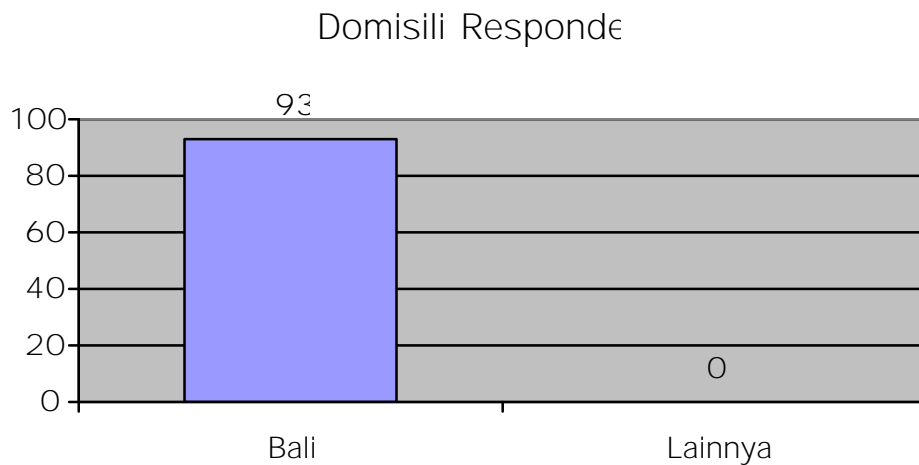
3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, semua responden dari kota Bali (100,00%).

Tabel 6. Domisili Responden

No.	Domisili	Frekuensi	
		jumlah	%
1	Bali	93	100
2	Lainnya	0	0
Jumlah		93	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 3. Domisili Responden

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

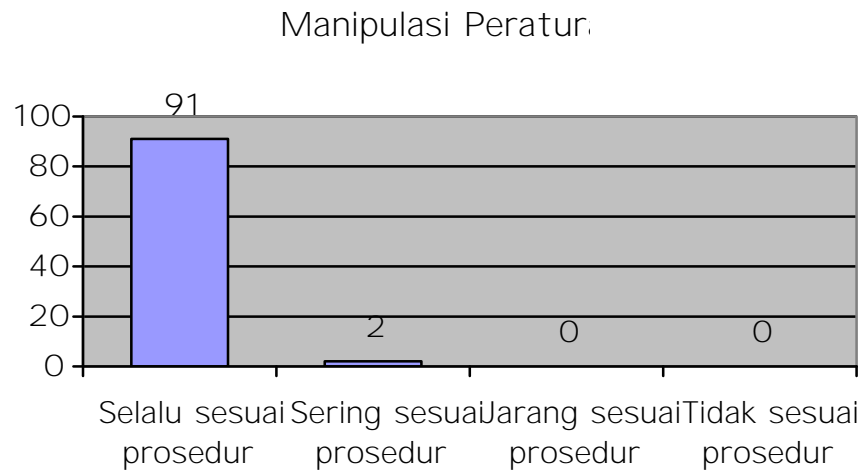
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,99 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi Denpasar bersih dari manipulasi peraturan.

Tabel 7. Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu sesuai prosedur	4	91	97,85%
2	Sering sesuai prosedur	3	2	2,15%
3	Jarang sesuai prosedur	2	0	0%
4	Tidak sesuai prosedur	1	0	0%
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 4. Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

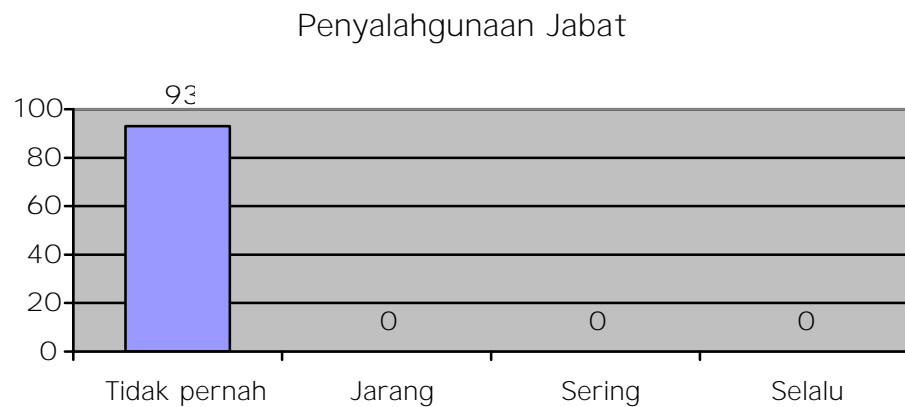
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi Denpasar bersih dari penyalahgunaan jabatan.

Tabel 8. Indeks pada penyalahgunaan jabatan

	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	93	100%
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0%

	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0%
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0%
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 5. Penyalahgunaan Jabatan

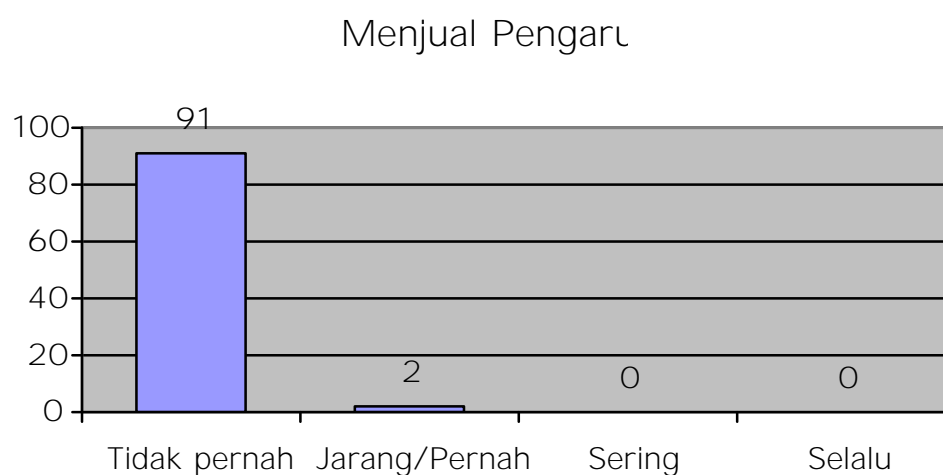
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Denpasar bersih dari penyalahgunaan pengaruh.

Tabel.9. Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak pernah	4	91	97,85
2	Jarang/pernah	3	2	2,15
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			93	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 6. Menjual Pengaruh

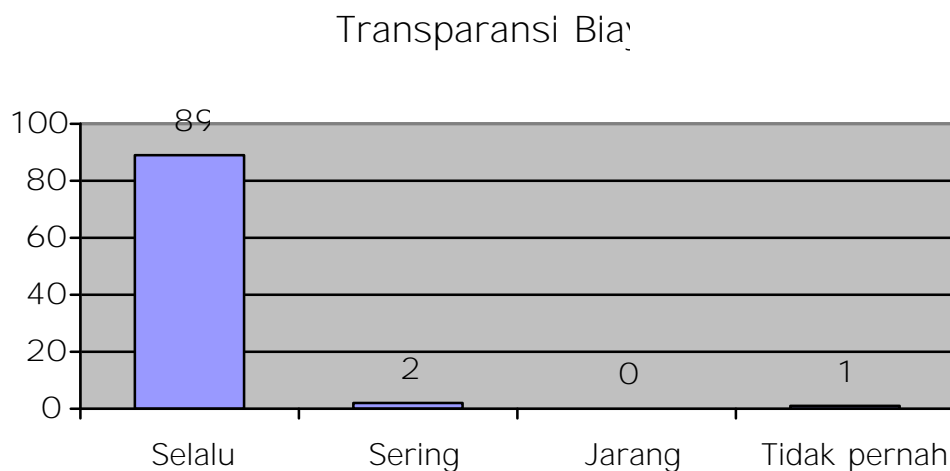
3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,95 dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi denpasar transparan dalam informasi tarif/biaya.

Tabel. 10. Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	89	96,70
2	Sering	3	2	2,15
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak pernah	1	1	1,07
Jumlah			99	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 7. Transparansi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

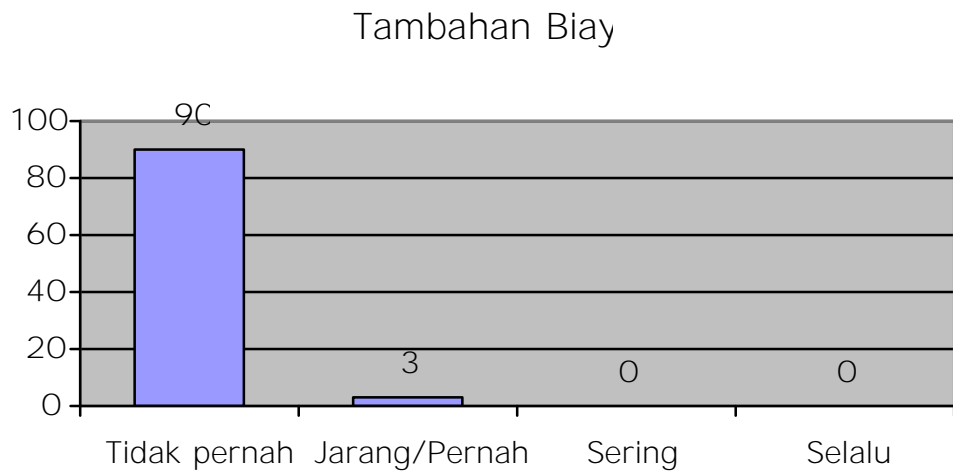
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,97. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja

Satuan Kerja pada pengadilan Denpasar bersih dari biaya tambahan diluar biaya resmi.

Tabel. 11. Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	90	96,77
2	Jarang/pernah	3	3	3,22
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			93	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 8. Tambahan Biaya

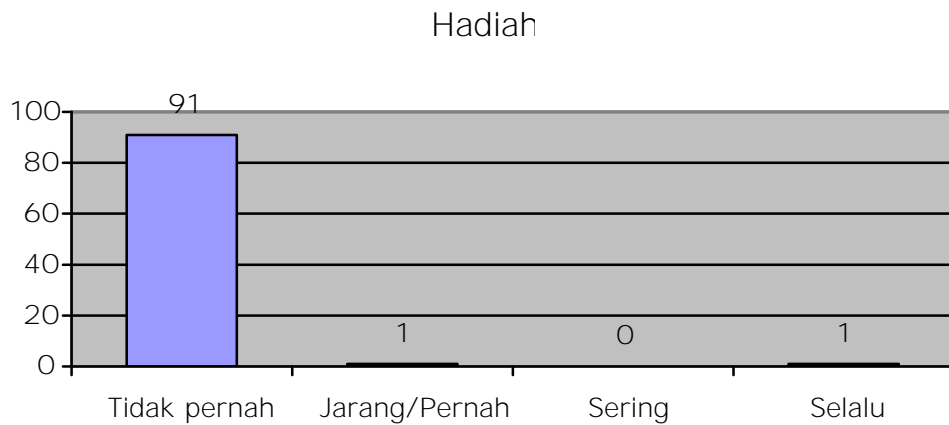
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,96 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Denpasar bersih dari pemberian hadiah.

Tabel. 12. Indeks pada indikator hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	91	97,85
2	Jarang/pehah	3	1	1,07
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	1	1,07
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 9. Hadiah

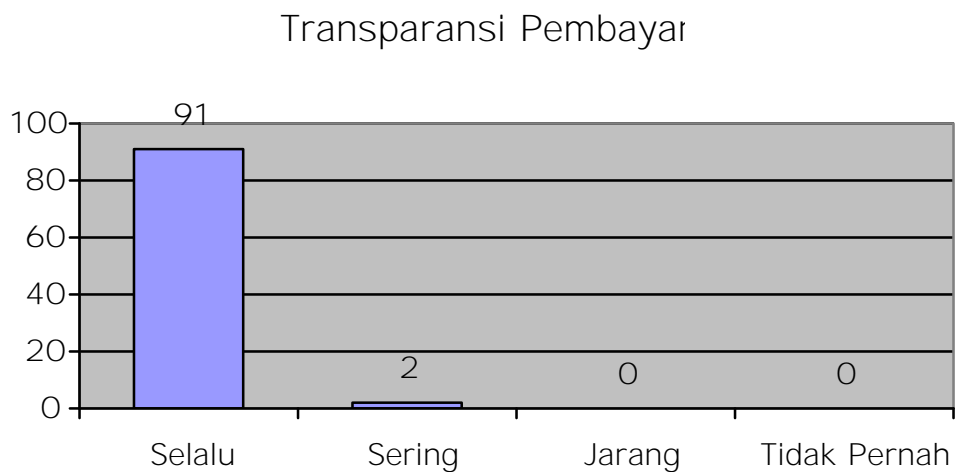
3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3,98 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pembayaran.

Tabel. 13. Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	91	97,85%
2	Sering	3	2	2,15%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak pernah	1	0	0%
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 10. Transparansi Pembayaran

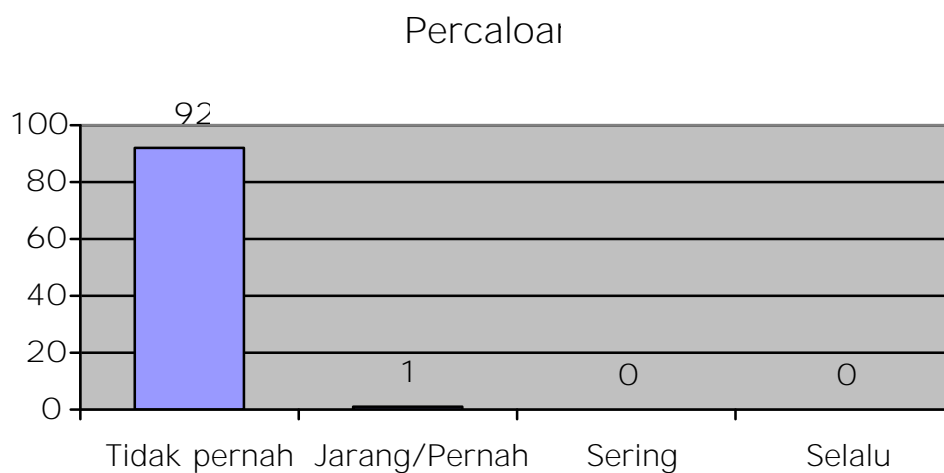
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,99 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel. 14. Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	92	98,92%
2	Jarang/Pernah	3	1	1,07 %
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 11. Percaloan

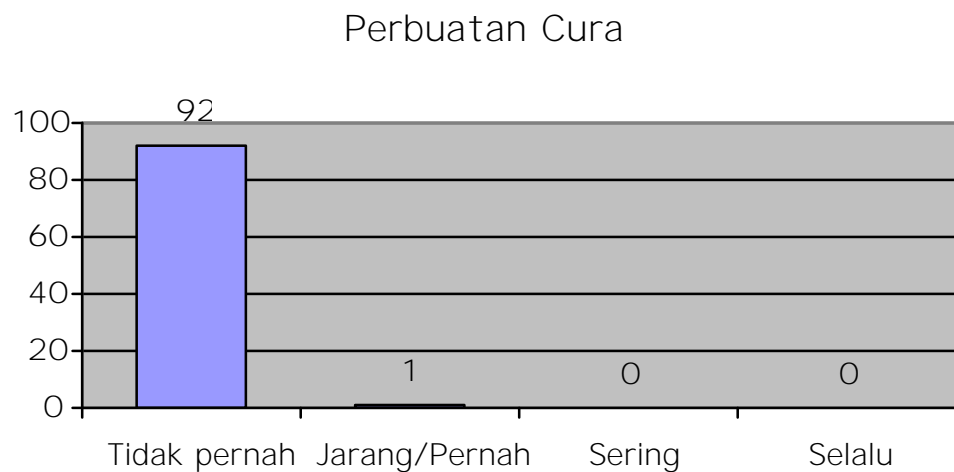
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,99 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari perbuatan curang.

Tabel 15. Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	92	98,92%
2	Jarang/Pernah	3	1	1,07 %
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 12. Perbuatan Curang

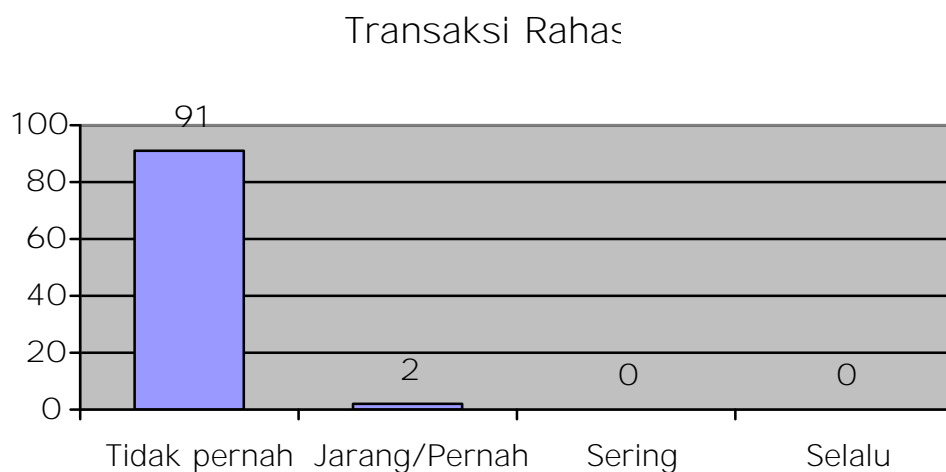
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,98. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi denpasar bersih dari transaksi di luar transaksi resmi.

Tabel.16. indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak pernah	4	91	97,85
2	Jarang/Pernah	3	2	2,15
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			93	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 13. Transaksi Rahasia

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

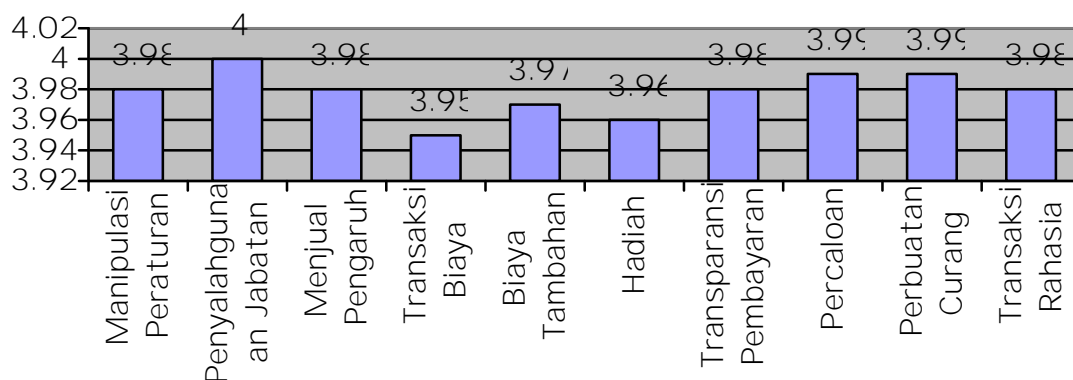
Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi denpasar sebesar 3,98 / 99,41 %

**Tabel .17. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan
Tinggi denpasar**

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,98
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q 3	Menjual Pengaruh	3,98
Q 4	Transaksi Biaya	3,95
Q 5	Biaya Tambahan	3,97
Q 6	Hadiah	3,96
Q 7	Tranparansi Pembayaran	3,98
Q 8	Percaloan	3,99
Q 9	Perbuatan Curang	3,99
Q 10	Transaksi Rahasia	3,98
Jumlah		3,98

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Indeks Persepsi Koru



Grafik 14. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks 3,98 / 99,41 % tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100.

Tabel .18. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi denpasar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Tinggi denpasar. Namun dari semua responden, tidak ada yang memberikan masukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Tinggi Denpasar memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98 dengan hasil konversi 99,41 % atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

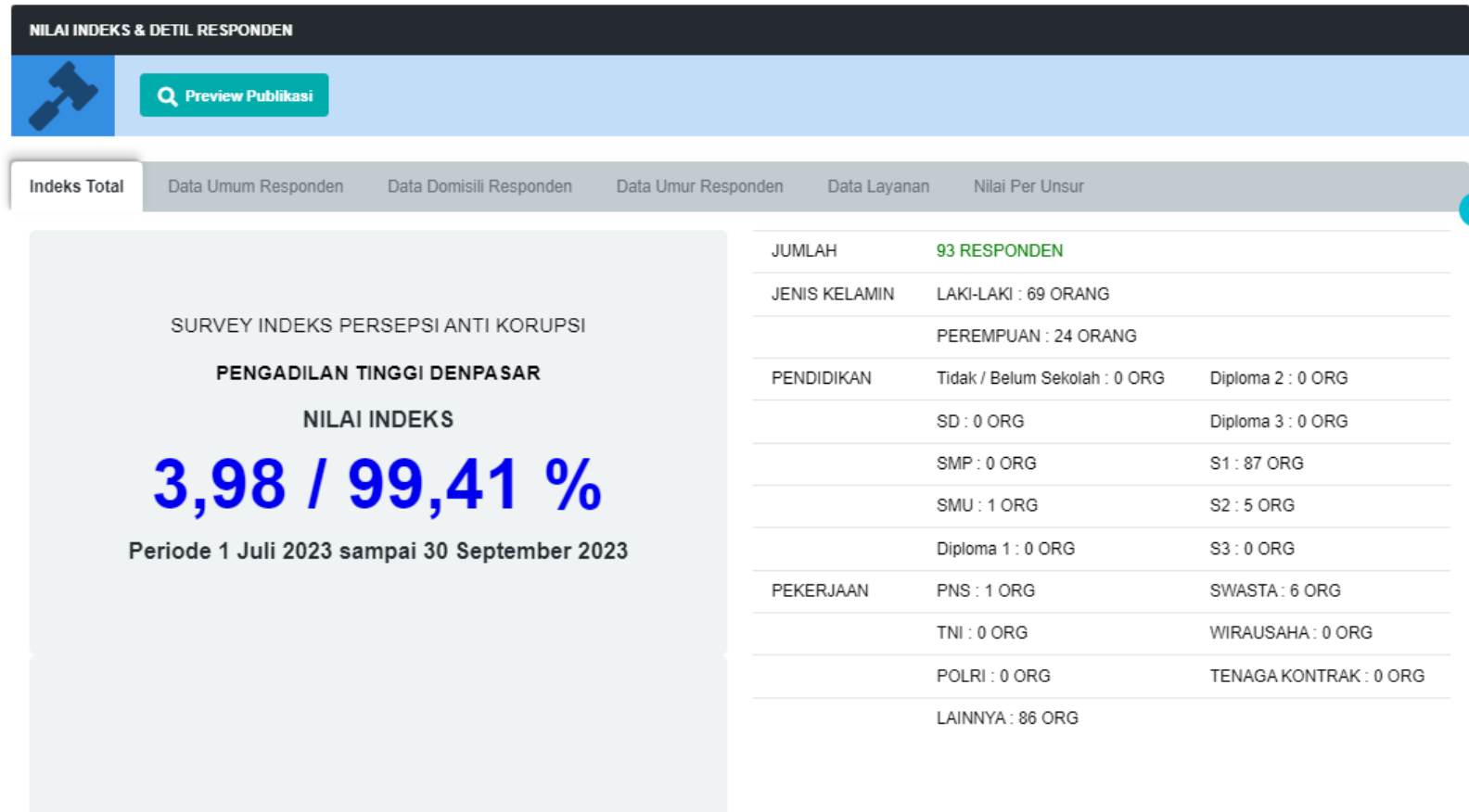
1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,95
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,96
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,98
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,99
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,99
10. Indikator Transaksi Rahasia mendapat Indeks 3,98

4.2. Rekomendasi


Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Denpasar Triwulan III tersebut di atas, menunjukkan bahwa semua indikator memiliki rata-rata indeks 3,98 atau mendekati maksimal dan masuk pada kategori bersih dari korupsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. INDEKS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)



B. DATA DOMISILI RESPONDEN

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN					
	Preview Publikasi				
Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Daerah Domisili		Jumlah (Orang)			
1	BALI	93			

C. DATA LAYANAN

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



 Preview Publikasi

Indeks Total

Data Umum Responden

Data Domisili Responden

Data Umur Responden

Data Layanan

Nilai Per Unsur



	Layanan	Jumlah (Orang)
1	Layanan Perdata	1
2	Layanan Hukum / Informasi	72
3	Layanan Administrasi Umum	2
4	Layanan e-Court	18

D. NILAI UNSUR TERENDAH

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	367
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	368
3	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	369

E. NILAI UNSUR TERTINGGI

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	372
2	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	371
3	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	371

F. RESPONDEN SPAK TRIWULAN II BULAN JULI - SEPTEMBER 2023

	Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	KETUT FENDY RISWANDINATA	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 25 September 2023
2	DAYANANDA WASUNDARI	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 22 September 2023
3	Ngurah Mayun Yogi Mudiarta	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 22 September 2023
4	LUH KETUT DEVA GANIKA	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 22 September 2023
5	Komang Jumena	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 15 September 2023
6	Edward Tomuara Hasibuan	Layanan Hukum / Informasi	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Kamis, 14 September 2023
7	I GEDE AGUNG SANJAYA DWIJAKSARA	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 11 September 2023
8	Anonim	Layanan Administrasi Umum	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	Jumat, 1 September 2023
9	Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, SH., M	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 31 Agustus 2023 09
10	Anak Agung Yuka Taurusia Eny, SH.	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 31 Agustus 2023 09
11	IING SOLIHIN, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
12	Jontor Sihombing, S.H., M.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
13	FILIPUS EDGAR SARAGIH, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
14	Aas Hanifah, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
15	Muhammad Amin Nasution, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
16	WAHYUDIN RAMBE, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
17	Remigius Besin, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
18	Ilham Farobi Ouardani, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
19	Rangga Prastetyo Noor, S.Sy., S.H., M	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 11
20	Wahyu Pananta Negoro, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
21	Khosniatul Hasanah, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
22	RION SATYA, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
23	RACHEL ALDHEA SALSABILLAH, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
24	Nur Hafidah Hidayat, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
25	SABDA ADIDHARMA PUTRAPAJA BAH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
26	KARMADI, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
27	Emanuella Theo Dharoline, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
28	Elsa Debora, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
29	Iwan Setiawan, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 09
30	Wasil, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 08
31	Marianus Oktavian Dalung, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 08
32	Nanang Suyatna, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 08
33	Hairus, S.H.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 08
34	I MADE MUSTIANA, S.H.	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 29 Agustus 2023 08
35	Gusti Agung Chandra Kumala Dewi, S	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Agustus 2023 10
36	I Gede Simpen, SH	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 28 Agustus 2023 09
37	Brahmanda Candra	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 25 Agustus 2023 07
38	Sureksha Satya	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 25 Agustus 2023 07
39	I Wayan Jana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 22 Agustus 2023 09
40	Rahmat Mulyana Sh	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	Senin, 21 Agustus 2023 08
41	Yulya	R-O Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Senin, 21 Agustus 2023 08
42	Putu Gede Yamuna	Layanan Administrasi Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 21 Agustus 2023 07
43	I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 10 Agustus 2023 14
44	I MADE SUARTANA, S.H.	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 9 Agustus 2023 14:0
45	Elisabeth Sanam	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 31 Juli 2023 10:54:1
46	Elisabeth Sanam, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 09:10:0
47	Kurnia Mulia, KI, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 08:57:3
48	Feily Las Agung Nababan, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 08:42:5
49	Rieka Putri Tampubolon, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 08:22:5
50	Foarota Harefa, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 08:15:5
51	David Cahyadi, SH.CCD, CLA.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 08:03:0

52	Raka Dwi Permana, SH.,CTA.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 07:54:4
53	Andreas, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 07:46:3
54	Minto Wijaya, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 07:40:3
55	Achmad Amin Amiruddin Bachtiar, S	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 27 Juli 2023 07:31:5
56	Sulastriyani, SH.MH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:52:4
57	Sri Sinduwati, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:45:4
58	Haekal Abdalla Jouf, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:36:4
59	Jeat Ahmad Fatoni, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:30:0
60	Septiadi Maulidin, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:25:0
61	Fitri Camelis Anada, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:19:2
62	DedY Ariyanto, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:13:2
63	Putu Ari Kusuma, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 09:05:2
64	Komang Bayuada Yustiawan Karna, S	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 08:52:2
65	I Gede Putu Astono, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 08:41:1
66	Putu Surya Mahaesa Putra, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 08:28:5
67	Made Aswin Sughiartana, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 08:23:3
68	Ngurah Gede, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 26 Juli 2023 08:15:5
69	I Gede Simpen, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 15:29:
70	I Wayan Sudana,SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 15:23:
71	I Gusti Putu Armayuda, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 10:57:
72	I Wayan Sudira, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 10:09:
73	I Ketut Suberata, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 10:00:
74	I Nyoman Sukarya, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 09:47:
75	Made Sutirto, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 09:41:
76	I Gede Suastika, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 09:20:
77	Ni Kade Yulya Artasih, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Juli 2023 09:16:
78	I Nyoman Nuada, SH.,MH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 24 Juli 2023 15:27:3
79	Raka Dwi Permana	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 24 Juli 2023 13:02:4
80	HARIYANTO, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 12:53:4
81	SUCIPTO SUN, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 11:00:5
82	FINA ULOY SANCHA, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:52:0
83	I KADEK SEPTARIANAN, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:43:4
84	KOMANG REDIAWAN SEPUTRA, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:37:4
85	I MADE KUMBARA YASA, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:28:5
86	I GEDE GERY MARDIASTRA, SH.	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:22:2
87	NYOMAN PHILIP, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:18:5
88	IDA BAGUS PUTU GEDE WIDYA	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:12:1
89	IDA BAGUS PUTU KEMENUH, SH	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 10 Juli 2023 10:03:1
90	Agus Telling	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	Kamis, 6 Juli 2023 10:38:09
91	Gede Hakiki	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 6 Juli 2023 09:41:04
92	Kadek Agustan Dwi Pradita, S.H.	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 6 Juli 2023 09:22:55
93	Dewa Ayu Surya Lahuru Dewantari, S	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 3 Juli 2023 12:56:28

MONEV DAN TINDAKLANJUT



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

Jalan Tantular Barat Nomor 1, Kelurahan Daging, Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur
Kota Denpasar, Bali 80234, www.pt-denpasar.go.id, ptdpsbali@gmail.com

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT
3 UNSUR TERENDAH SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II TAHUN 2023
NILAI INDIKATOR 3,98 / 99,41 %
PENGADILAN TINGGI DENPASAR**

No.	Evaluasi 3 Indikator Terendah	Tindak Lanjut	Bukti dukung
1	Indek Transaksi Biaya = 367 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya menunjukkan hasil pada indeks 367, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada memungut biaya tambahan kecuali biaya resmi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.	Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengintruksikan kepada anggota Tim survei dan petugas PTSP serta Pemberi layanan agar layanan dilakukan sesuai SOP dan peraturan Perundang-undangan yaitu dengan memerintahkan membuat standar jenis layanan yang ditayangkan pada TV media serta pembuatan brosur dan mengupload pada web PT Dps. untuk dapat diketahui dan dilaksanakan dengan mudah oleh pengguna layanan dan pemberi layanan, tidak ada memungut biaya tambahan kecuali biaya resmi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.	Foto dokumentasi pengarahannya kepada petugas PTSP, brosur standar pelayanan, standar pelayanan pada PTSP, dan website PT Denpasar.

<p>2</p>	<p>Indikator Hadiah = 368</p> <p>Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah menunjukkan hasil pada indicator 368, di mana terdapat 1 dari 93 orang responden yang menjawab dengan skala 3, 1 orang menjawab dengan skala 1, dan 91 orang menjawab dengan skala 4. Dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar sudah sangat baik, hampir tidak ada indikator pemberian tanda terima kasih/hadiah, namun harus tetap meningkatkan kualitas pelayanan dengan selalu memperhatikan standar pelayanan dan SOP yang berlaku.</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengintruksikan kepada anggota Tim survei dan petugas PTSP serta pemberi layanan untuk tidak menerima ataupun meminta hadiah atau tanda terima kasih di luar ketentuan yang berlaku, serta selalu melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur, sebagaimana ketentuan Peraturan Perundangan serta SOP Pengadilan Tinggi Denpasar.</p>	<p>Foto dokumentasi pengarahan kepada petugas PTSP, brosur standar pelayanan, standar pelayanan pada PTSP, dan website PT Denpasar.</p>
<p>3</p>	<p>Indikator Biaya Tambahan = 369</p> <p>Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan</p>	<p>Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar telah mengintruksikan kepada anggota Tim survei dan petugas PTSP serta Pemberi layanan agar</p>	<p>Foto dokumentasi pengarahan/pembinaan kepada petugas</p>

<p>menunjukkan hasil pada indeks 369, dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak ada memungut biaya tambahan kecuali biaya resmi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>layanan dilakukan sesuai SOP dan peraturan Perundang-undangan yaitu dengan memerintahkan membuat standar jenis layanan yang ditayangkan pada TV media serta pembuatan brosur dan mengupload pada web PT Dps. untuk dapat diketahui dan dilaksanakan dengan mudah oleh pengguna layanan dan pemberi layanan, tidak ada memungut biaya tambahan kecuali biaya resmi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>PTSP, brosur standar pelayanan, standar pelayanan pada PTSP, dan website PT Denpasar.</p>
--	--	--

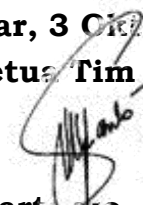
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar



Dr. Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Denpasar, 3 Oktober 2023

Ketua Tim Survei



Dr. Suharto, S.H., M.H.



**Mengetahui
Ketua**



H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.

EVIDEN TINDAK LANJUT



Ketua Tim Survei memberikan instruksi/pengarahan kepada Petugas PTSP



Beranda

Tentang Pengadilan

Layanan Publik

Layanan Hukum

Kelemb

Hubungi Kami

Informasi Berbasis



STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan

Telah dibaca: 476 Kali

Tanggal Upload: 23 Juni 2020

1. STANDAR PELAYANAN UPAYA HUKUM BANDING
2. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN
1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN VERIFIKASI AKUN E-Court ADVOKAT
4. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN PENAHANAN
5. STANDAR PELAYANAN PENYIMPANAN ADVOKAT
6. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
7. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN RISET



Message us



Standar Pelayanan pada Website PT Denpasar

TV MEDIA:



BANNER:



BROSUR:



POP UP POSTER ANTI GRATIFIKASI PADA WEBSITE PT DENPASAR:

